BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM MANAJEMEN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI
(SI – MANIS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus dikelola secara baik dan terpadu, maka dengan berpedoman sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang teknis dijabarkan dalam Peraturan Bupati ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu diterapkan secara efektif, efisien, terukur dan terarah dengan menggunakan sistem inovasi yang digulirkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah melalui Sistem Manajemen Pelayanan Pajak dan Retribusi dengan akronim SI-MANIS.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Sistem Manajemen Pelayanan Pajak dan Retribusi (SI-MANIS).

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) diubah dengan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG SISTEM MANAJEMEN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI (SI-MANIS);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

6. Sistem adalah suatu satu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan bersama;
7. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan SDM, sampai dengan pengendalian agar bias mencapai tujuan dari suatu kegiatan agar menjadi lebih mudah berkembang karena dijalankan secara structural dan procedural;
8. Pelayanan prima adalah pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan atau masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya; upaya memenhi kebutuhan atau permintaan; menyiapkan; mengurus yang diperlukan secara prima, sehingga pelanggan mendapatkan sesuatu yang melebihi harapannya;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepadaDaerahyangterutangolehorangpribadiataubadanyangbersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 3 perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
30. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
35. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

36. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
37. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Dearah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.
38. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketetuan tertentu.
39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajakatau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
41. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
42. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
46. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
47. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
48. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

BAB II
LATAR BELAKANG

Pasal 2

(1) Dalam rangka pemenuhan standar pelayanan birokrasi yang akuntabel, maka diperlukan langkah strategis melalui inovasi daerah dalam merumuskan sistem manajemen pelayanan khusus dibidang pajak dan retribusi daerah yang diyakini berdampak baik terhadap kinerja pemerintah daerah dan masyarakat yang berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan daerah;
(2) Untuk melaksanakan langkah strategis sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan program karya inovasi "Sistem Manajemen Pelayanan Pajak dan Retribus (SI-MANIS)";

BAB III
TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 3

(1) Tujuan Inovasi Daerah SI-MANIS adalah ;
   a. Tujuan Jangka Pendek ;
      1) Tersedianya Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
      2) Terwujudnya akuntabilitasnya pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
      3) Terwujudnya kerjasama Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah pada internal stakholder Badan Pendapatan Daerah.
   b. Tujuan Jangka Menengah;
      1) Tersedianya sarana informasi standar operasional Prosedur Sistem Pelayanan Pajak dan Retribusi pada ruang publik
      2) Terwujudnya kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi terkait pengelola pendapatan daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.
      3) Tercapainya 75 % target pendapatan pajak dan retribusi daerah.
   c. Tujuan Jangka Panjang;
      1) Terwujudnya akses Informasi Pelayanan Pajak dan Retribusi secara digital.
      2) Tercapainya 100 % target pendapatan pajak dan retribusi daerah.

(2) Maksud Inovasi Daerah SI – MANIS adalah ;
   a. Untuk menyediakan Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Pajak Daerah, bagi peningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada khususnya dan kinerja pemerintah daerah pada umumnya.
   b. Memudahkan akses dan kontrol terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
   c. Memiliki Standar Operasional dan Prosedur pekerjaan yang simpel dan fleksibel penggunaanya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan pajak dan retribusi daerah.

BAB IV
M A N F A A T

Pasal 4

Manfaat inovasi daerah **"SI-MANIS"** atau Sistem Manajemen Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah adalah ;

a. Untuk Pemerintah Daerah
   1) Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.
   2) Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
   3) Meningkatkan Perekonomian Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat.
b. Untuk Badan Pendapatan Daerah
   1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif.
   2) Meningkatkan pendapatan asli daerah.
c. Untuk Masyarakat
   1) Memudahkan akses informasi layanan pajak dan retribusi daerah.
   2) Meningkatkan partisipasi bayar pajak retribusi daerah.

BAB IV
PARA PIHAK PENDUKUNG SIMANIS

Pasal 5

(1) Para pihak pendukung inovasi daerah SI-MANIS terdiri dari :

No	Stakeholder	Peran	Teknik Komunikasi
1	Bupati Halmahera Barat	Memberikan arahan dan dukungan kebijakan terkait rancangan Inovasi "SI-MANIS"	Komunikasi intens terkait dukungan terhadap inovasi "SI-MANIS"
2	Bapenda Propinsi	Memberikan dukungan dan arahan terkait pelaksanaan inovasi "SI-MANIS"	Koordinasi
3	DMPTSP Halbar	Memberikan dukungan terkait keterkaitan peran dan fungsi terhadap inovasi "SI-MANIS"	Koordinasi
4	Halbar	Memberikan dukungan terkait peran strategis dukungan perencanan terhadap pelaksanaan inovasi "SI-MANIS"	Koordinasi
5	Halbar	Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan inovasi "SI-MANIS"	Koordinasi atau RDP dengan Komisi terkait
6	Camat	Memberikan Dukungan terhadap pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan penagihan PBB	Koordinasi, kerjasama
7	Kepala Desa	Memberikan Dukungan terhadap pelaksanaan penagihan PBB	Koordinasi dan Kerjasama
8	DPMD Halbar	Memberikan Dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan control penagihan PBB	Koordinasi dan kerjasama
9	SATPOL PP	Memberikan dukungan terhadap penegakan peraturan daerah Pajak dan retribusi daerah	Koordinasi dan kerjasama
10	Media Masa	Memberikan dukungan publikasi terhadap pelaksanaan inovasi "SI-MANIS"	Komunikasi untuk publikasi
11	ORGANDA	Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan inovasi "SI-MANIS"	Komunikasi
12	OPD terkait pengelola Pendapatan	Memberikan dukungan terhadap pelksanaan inovasi 'SI-MANIS"	Komunikasi rutin
13	Masyarakat	Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan inovasi "SI-MANIS"	Komunikasi dan sosialisasi

(2) Pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berperan serta secara aktif sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB V
JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 6

a. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
b. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 7

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :
   a. PBB-P2;
   b. Pajak Reklame;
   c. PAT
   d. Opsen PKB;dan
   e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas :
   a. BPHTB;
   b. PBJT atas:
      1. Makanan dan/atau Minuman;
      2. Tenaga Listrik;
      3. Jasa Perhotelan;
      4. Jasa Parkir; dan
      5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
   c. Pajak MBLB; dan
   d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB VI
JENIS PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 8

(1) Jenis retribusi terdiri atas:
   a. Retribusi Jasa Umum;
   b. Retribusi Jasa Usaha; dan
   c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Objek Retribusi yakni penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 9

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Pelayanan kesehatan;
   b. Pelayanan kebersihan;
   c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
   d. Pelayanan pasar.

(2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut retribusi yakni Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

(3) Struktur dan besaran tariff Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 10

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
   d. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
   e. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
   f. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
   g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   h. Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kenderaan Di Air;
   i. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
   j. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut retribusi yakni:
   a. Pelayanan jasa pelabuhan; dan
   b. Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di air.

(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 11

(1) Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c. meliputi:
   a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
   b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(2) Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c yang tidak dipungut retribusi yaitu pengelolaan pertambangan rakyat.

(3) Struktur dan besaran tariff Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 12

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang bestatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 13

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 14

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
   a. Tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
   b. Tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

(5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

(6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut beerdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

(9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. Jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

b. Jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi Daerah

Pasal 16

(l) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan disetor ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

(7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

(2) Kerjaa sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasarn, dan Pemeriksaan.

(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

(4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.

(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII
PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 18

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
   a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
   b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
   c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
   a. Pemberian NPWPD secara jabatan;
   b. Penghapusan NPWPD;
   c. Penyelesaian permohonan keberatan WajibPajak;
   d. Pencocokan data dana/atau alat keterangan; dan/atau
   e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:

a. Meminta Identitas dan Bukti Penugasan Pemeriksaan Kepada Pemeriksa;

b. Meminta Kepada Pemeriksa Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Alasan dan Tujuan Pemeriksaan; dan

c. Menerima Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Memberikan Tanggapan atau Penjelasan Atas Hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VIII
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 21

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
   b. Menerbitkan:
      1. Surat Teguran;
      2. Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
      3. Surat Paksa;
      4. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
      5. Surat perintah penyanderaan;
      7. Pengumuman lelang;
      8. Surat penentuan harga limit;
      9. Pembatalan lelang; dan
      10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 23

Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

b. Penanggung Pajak memindah-tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 24

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Piutang Pajak

Pasal 25

(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. Pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1); dan

b. Hasil Koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Daerah.

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Piutang Retribusi

Pasal 26

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 27

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan dan retribusi Daerah kepada Wajib Pajak dan retribusi, berupa:
   a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan retribusi; dan/atau.
   b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak dan retribusi terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak dan retribusi yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak dan retribusi terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak dan retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak dan retribusi sehingga Wajib Pajak dan retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak dan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dan retribusi dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. Menyetujui Jumlah angsuran Pajak dan retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. Menyetujui Sebagian jumlah angsuran Pajak dan retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak dan retribusi; atau

c. Menolak permohonan Wajib Pajak dan retribusi.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak dan retribusi yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

a. Bencana alam;

b. Kebakaran;

c. Kerusuhan missal atau huru-hara;

d. Wabah penyakit; dan/atau

e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

Pasal 28

(1) Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif Pajak dan Retribusi kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Pemberian insentif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN TEKNIS

Pasal 29

Hal-hal teknis terkait Standart Operating Prosedure (SOP) tentang Sistem Mamnajemen Pelayanan Pajak dan Retribusi (SI-MANIS) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di J a i l o l o
Pada tanggal 7 November 2023,-
BUPATIHALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 7 November 2023,-
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENHALMAHERA BARAT

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid Adm Umum	
Kabag Hukum & Org.	
Kepala Bapenda	

Drs. H. M. SYAHRIL ABD. RADJAK., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660420 199203 1 009

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.
Pembina (IVa)
Nip. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 29